

TUGAS AKHIR

**PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM
MEMELIHARA PEMBAYARAN PAJAK PADA TRANSAKSI
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DENGAN KUASA
MENJUAL**

(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS WILAYAH KOTA MALANG)

Oleh:

Amanda Putri Rahmawati

NIM: 202010110311030



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MEMELIHARA
PEMBAYARAN PAJAK PADA TRANSAKSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI (PPJB) DENGAN KUASA MENJUAL
(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS WILAYAH KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AMANDA PUTRI RAHMAWATI
NIM: 202010110311030

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM
MEMELIHARA PEMBAYARAN PAJAK PADA TRANSAKSI
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DENGAN KUASA
MENJUAL
(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS WILAYAH KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:

AMANDA PUTRI RAHMAWATI

202010110311030

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdian Anggraeny, SH., MKn

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

AMANDA PUTRI RAHMAWATI

202010110311030

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMANDA PUTRI RAHMAWATI

NIM : 202010110311030

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM
MEMELIHARA PEMBAYARAN PAJAK PADA TRANSAKSI PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DENGAN KUASA MENJUAL
(STUDI KASUS KANTOR NOTARIS WILAYAH KOTA MALANG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Mei 2024

Amanda Putri Rahmawati

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Skripsimu pasti selesai, dan akan segera di wisuda
Prosesnya memang melelahkan, tapi jangan menyerah
Demi orang rumah yang menanti gelarmu



ABSTRAKSI

Nama : Amanda Putri Rahmawati
NIM : 202010110311030
Judul : Peran Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memelihara Pembayaran Pajak Pada Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Kuasa Menjual (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Malang)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn.

Kasus di Malang, Jawa Timur ditemukan bahwa pada transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual digunakan untuk melakukan penghindaran pajak jual beli berupa Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran dan pertanggungjawaban Notaris dalam memelihara pembayaran pajak pada transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis perilaku hukum dengan norma hukum dengan cara mengumpulkan data di lapangan yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Malang, Jawa Timur, dan sampel yang di ambil meliputi beberapa kantor Notaris dan kantor Pajak di Malang. Peran Notaris dalam memelihara pembayaran pajak pada transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual ialah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya para penghadap; memberikan nasihat hukum mengenai akta otentik yang dibuat; mengingatkan kepada para penghadap atas kewajibannya melunasi pembayaran pajak sebelum akta tersebut ditandatangani oleh Notaris; serta membantu para penghadap untuk membayar pajak ke kantor pajak setempat. Notaris berwenang menolak pembuatan akta otentik dengan alasan dan pertimbangan hukum yang kuat. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual yang dilakukan oleh para penghadap untuk menghindari pajak dengan melibatkan akta otentik Notaris. Pertanggungjawaban Notaris sebatas menjadi saksi atas perbuatan hukum para penghadap yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); Kuasa Menjual; Notaris.

ABSTRACT

Name	: Amanda Putri Rahmawati
NIM	: 202010110311030
Title	: Roles and Responsibilities of Notaries in Maintaining Tax Payments on Binding Agreement Transactions Sale and Purchase (PPJB) with the Power to Sell (Case Study of Malang City Regional Notary Office)
Adviser	: 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 2. Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn.

In the case of Malang, East Java, it was found that in land and/or building sale and purchase transactions outlined in the form of a Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) with the Power of Sale, it was used to avoid sale and purchase taxes in the form of Final Income Tax (Final Income Tax) and Acquisition Fees. Land and Building Rights (BPHTB), which causes state financial losses. The aim of this research is to analyze the role and responsibilities of Notaries in maintaining tax payments on Sales and Purchase Agreement (PPJB) transactions with Power of Attorney to Sell. This research method uses empirical research methods to analyze legal behavior with legal norms by collecting data in the field which is analyzed using a qualitative approach. The research location was in Malang, East Java, and the samples taken included several Notary offices and Tax offices in Malang. The role of the Notary in maintaining tax payments on Sales and Purchase Agreement (PPJB) transactions with the Power of Sale is to provide legal education to the public, especially the parties; provide legal advice regarding authentic deeds made; reminding parties of their obligation to pay taxes before the deed is signed by a Notary Public; as well as helping filers to pay taxes to the local tax office. The notary has the authority to refuse to make an authentic deed with strong legal reasons and considerations. Notaries cannot be held responsible if there is misuse of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) and Power of Sale by parties to avoid taxes by involving an authentic notary deed. The Notary's responsibility is limited to being a witness to the legal actions of the parties expressed in the form of an authentic deed.

Keywords : Sale and Purchase Agreement (PPJB); Authorization to Sell; Notary.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

AlhamdulillahiRobbil ‘aalamiin segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia – Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Judul penulisan Tugas Akhir yang diangkat Penulis, ialah: “**PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MEMELIHARA PEMBAYARAN PAJAK PADA TRANSAKSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DENGAN KUASA MENJUAL (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS WILAYAH KOTA MALANG)”**

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, serta bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan seluruh Jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum., dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis, yang telah

memberikan waktunya secara intensif dan responsif selama bimbingan berlangsung, serta memberikan saran dan masukan terhadap Tugas Akhir ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan saran selama perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membantu pengurusan administrasi Penulis selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Instansi - Instansi yang turut membantu terselesaiannya penulisan Tugas Akhir ini.
7. Orang tua Penulis, Mama Ika Wahyuningtyas dan Papa Rakhmat Purwadi, ST., yang menjadi semangat Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kasih sayang dan pengorbanan yang mama dan papa berikan tidak akan bisa terbalas, tapi Insya Allah putrimu ini akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat mama dan papa bangga. Semua yang Penulis lakukan sampai hari ini akan didedikasikan untuk kebahagiaan mama dan papa.
8. Kakek dan Nenek Penulis, Bunda Sukaningtyas dan Kong Sariyatim yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil kepada Penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga Penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh Penulis.

9. Alm. Eyang Kakung dan Almh. Ut, H. Aab Gunawan dan Hj. Sutiayah yang menjadi sosok inspirasi Penulis untuk mengambil Studi Hukum. Terimakasih untuk kasih sayang penuh yang diberikan kepada Penulis dan menjadi sosok yang selalu Penulis rindukan.
10. Seluruh teman – teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang Penulis sayangi, khususnya bagi teman – teman seperjuangan Penulis selama mengikuti ajang Perlombaan Kepenulisan Hukum, Debat Hukum, hingga Moot Court di tingkat Nasional.
11. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menjadi bagian dari Asisten Praktikum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan memberikan pengalaman kerja, ilmu pengetahuan, hingga relasi.
12. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom Komunitas Riset Dan Debat; Lembaga Semi Otonom Komunitas Peradilan Semu; dan Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menjadi wadah bagi Penulis untuk melatih dan mengembangkan skill akademisi maupun praktisi.
13. Pihak – pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu namanya yang begitu perhatian memberikan dorongan, serta doa restunya dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan mengenai Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Pertanahan dan Kenotariatan.

Akhir kata, Billahifiisabililhaq fastabiqul khairot.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR PUSTAKA	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	20
1. Pengertian	20
2. Jenis	20
3. Syarat Penggunaan	21
4. Masa Berakhir	22
B. Tinjauan Umum Kuasa Menjual	22
1. Pengertian	22
2. Alasan Pemberi Kuasa	23
3. Syarat Pemberian Kuasa	24
4. Macam – Macam Kuasa	24
5. Berakhirnya Pemberian Kuasa	25
C. Tinjauan Umum Notaris	25
1. Pengertian	25
2. Wewenang	26
3. Akta Otentik	26
D. Tinjauan Umum Pajak Jual Beli	27
1. Pajak Penghasilan Final (PPH Final)	27
a. Pengertian	27
b. Regulasi	29
c. Subjek dan Objek Pajak	29
d. Tarif Pajak	31
2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)....	31
a. Pengertian	31

b. Regulasi	32
c. Subjek dan Objek Pajak	33
d. Tarif Pajak	33
E. Landasan Teori	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Kuasa Menjual Untuk Menghindari Pajak	41
1. Kasus Posisi	41
2. Kerugian Keuangan Negara	48
3. Data Perolehan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) beserta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Malang Jawa Timur 5 (Lima) Tahun Terakhir	50
4. Pemeriksaan Pajak	61
B. Peran Notaris dalam Mencegah terjadinya Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual untuk Menghindari Pajak	65
C. Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Menjual untuk Menghindari Pajak	75
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
LAMPIRAN	90

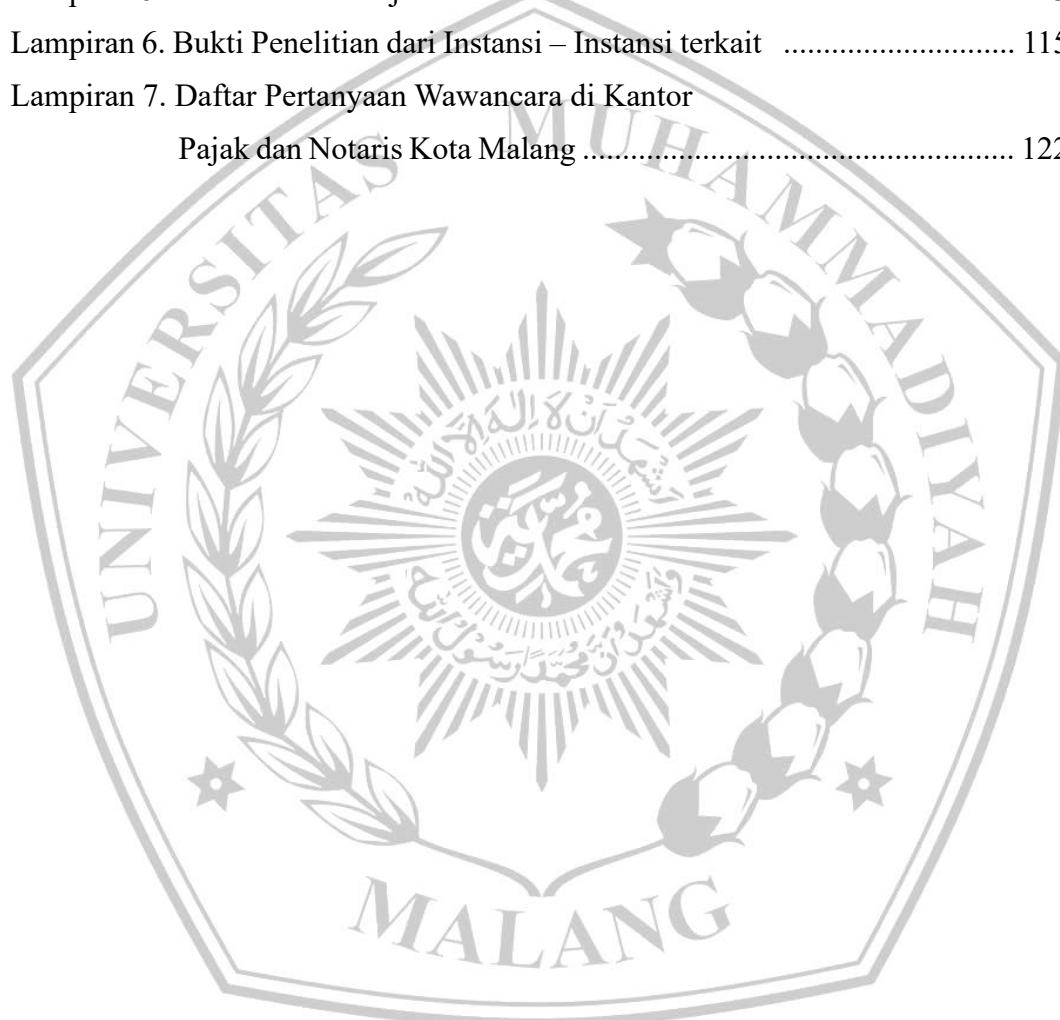
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2. Data Perolehan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Malang, Jawa Timur Tahun 2020 – 2024	50
Tabel 3. Penghitungan Pajak Penghasilan Final (PPh Final)	53
Tabel 4. Sanksi Administrasi Notaris	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Akhir	93
Lampiran 2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	95
Lampiran 3. Akta Kuasa Menjual	105
Lampiran 4. Kartu Kendali	111
Lampiran 5. Bukti Validasi Pajak dari Notaris	113
Lampiran 6. Bukti Penelitian dari Instansi – Instansi terkait	115
Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Pajak dan Notaris Kota Malang	122



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rusdianto Sesung Et Al. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia).
- Soeryono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Utsman S. 2020. *Metode Penelitian Hukum Progresif*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

- Fatma Ulfatun Najicha. 2022. *Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Surakarta. Jurnal Ius Civile. Volume 6. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Farida Kholismu. 2021. *Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Terhadap Tanah Dan Bangunan Dengan Kuasa Menjual*. Jurnal Signifikan Humaniora. Volume 2. Nomor 3. Universitas Islam Malang.
- I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara. Simon Nahak dan Ni Luh Made Mahendrawati. 2019. *Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*. Bali. Jurnal Hukum Prasada. Volume 6. Nomor 1. Universitas Warmadewa.
- I Ketut Gede Purnayasa, Ida Ayu Putu Widiati, And Luh Putu Suryani. 2021. *Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Atau Bangunan*. Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Nomor 3.
- I Nengah Suastika. 2021. *Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak*. Bali. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7. Nomor 1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Kristian Hutama, Ery Agus Priyono. 2023. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Semarang. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Volume 5. Nomor 1. Universitas Diponegoro.
- Made Wahyu Arthatdana. 2021. *Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 7. Nomor 2.
- Matuankotta J Sari A. 2022. *Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 3.
- Muhammad Irsyad Aulad. Ahmadi Miru. Oky Deviany Burhamzah. 2020. *Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris*. Makassar. Jurnal Amanna Gappa. Volume 28. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

- Ni Gusti Ketut Sri Astiti Putu Arya Bagus Utama, I Nyoman Sumardika. 2021. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dihadapan PPAT*. Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Nomor 1.
- Rahayu Harina, Busyra Azheri, And Yussy Adelina Mannas. 2023. *Penerapan Self Assessment System Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Media Of Law And Sharia. Volume 4. Nomor 2.
- Rahmat Ramadhani. 2022. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Kajian Hukum. Volume 3. Nomor 3.
- Rosma Mediana Pasaribu Alusianto Hamonangan, Mhd. Taufiqurrahman. 2021. *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan*. Jurnal Rectum. Volume 3. Nomor 2.
- Salsa Voni Larasati. 2022. *Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak*. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya. Volume 2. Nomor 1.
- Sholahuddin Al-Fatih Isdian Anggraeny. 2020. *Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 1.
- Yohana Danut And Ary Yunita Anggraeni. 2021. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak). Volume 3. Nomor 2.
- Zora Febriena Dwitia H.P. 2021. *Penyuluhan Hukum Masyarakat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Malang. Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat. Volume 1. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AMANDA PUTRI RAHMAWATI
Nim : 202010110311030

Dengan Judul Skripsi :

“ Peran Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Memelihara Pembayaran Pajak Pada Transaksi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Kuasa Menjual”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 15 Mei 2024

